

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. LKJIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen selama Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Penyusunan LKJIP ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan kinerja di masa mendatang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKJIP ini.

Kebumen, 27 Januari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kebumen



Widiatmoko S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196811281996031006

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Fungsi Strategis	4
1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi	5
1.4. Tindaklanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Perencanaan Strategis	8
2.1.1. Rencana Strategis	8
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.	12
2.2. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.1.1. Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2025	16
3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dengan Tahun 2024	18
3.1.3. Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	19
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar	19
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	20
3.1.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	23
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Tujuan dan Sasaran	28
3.2. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP.....	37
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	37
4.2. Permasalahan/Kendala	38
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	38
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Identifikasi Masalah	6
Tabel 2 Tindaklanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	7
Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 5 Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	13
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
Tabel 7 Program dan Anggaran Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	14
Tabel 8 Skala Nilai Peringkat Kinerja	15
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025	17
Tabel 10 Jumlah Kejadian Konflik Tahun 2025	17
Tabel 11 Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dan Target 2025	18
Tabel 12 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	19
Tabel 13 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi	20
Tabel 14 Analisis Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi	21
Tabel 15 Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	24
Tabel 16 Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasi	27
Tabel 17 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	29
Tabel 18 Realisasi Anggaran Tahun 2025	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	3
Gambar 2 Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja	11
Gambar 3 Dokumentasi Review Internal Draft LKJIP	16
Gambar 4 Formulasi Pengukuran Tingkat Efisiensi	24

BAB I

PENDAHULUAN

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Hal ini mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, diharapkan dapat:

1. Menyajikan laporan yang terukur kepada publik atas kinerja yang telah dicapai.
2. Menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas, mengukur efektivitas program, serta mengidentifikasi masalah untuk perbaikan di periode berikutnya.
3. Menjamin adanya pengukuran kinerja yang sistematis untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi anggaran
4. Sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Mengkomunikasikan kinerja instansi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi publik.

1.1. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi ,pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitong, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi Forum Pimpinan Daerah;

- g. Pelaksanaan administrasi Badan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan, dan ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Kepala Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen



1.2. Fungsi Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi strategis dalam mendukung terwujudnya stabilitas nasional dan kondusivitas daerah sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik. Fungsi strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama memiliki fungsi strategis dalam memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah masyarakat. Bidang ini berperan penting dalam membangun karakter kebangsaan serta menanamkan wawasan kebangsaan guna meningkatkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Selain itu, bidang ini berfungsi strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama masyarakat sebagai bagian dari ketahanan nasional di tingkat daerah. Melalui fasilitasi dialog, pembinaan, dan kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan unsur terkait lainnya. Selain itu mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan berkeadilan sosial. Fungsi strategis tersebut diarahkan untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme, intoleransi, dan disintegrasi bangsa yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.

2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan stabilitas politik daerah yang kondusif dan demokratis. Bidang ini berperan dalam memfasilitasi pendidikan politik masyarakat guna meningkatkan partisipasi politik yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta mendorong terciptanya budaya politik yang santun dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi.

Selain itu, bidang ini menjalankan fungsi strategis dalam pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan agar berperan

aktif sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan, sekaligus memastikan keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Bidang ini juga berperan strategis dalam koordinasi dengan partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga iklim politik yang aman, tertib, dan kondusif.

3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah melalui pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Fungsi strategis lainnya adalah melakukan pencegahan dan penanganan konflik sosial secara terpadu melalui penguatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pusat Komunikasi dan Informasi Masyarakat (Puskomin), serta koordinasi lintas sektor dengan aparat keamanan, instansi vertikal, dan pemerintah daerah. Melalui pendekatan preventif, persuasif, dan dialogis, bidang ini bertujuan meminimalkan eskalasi konflik, menjaga kondusivitas wilayah, serta menciptakan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah.

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi berbagai permasalahan strategis yang berkembang seiring dengan dinamika global, nasional, dan lokal. Permasalahan tersebut berpotensi mempengaruhi stabilitas ideologi, politik, sosial, dan keamanan daerah, sehingga memerlukan penanganan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai daftar berikut :

Tabel 1 Identifikasi Masalah

No.	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme	Perlunya memperkuat ideologi Pancasila	Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar umat beragama/ penghayat kepercayaan;
			Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
			Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
		Masih minimnya wawasan kebangsaan	Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi.
			Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional.
			Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
		Masih perlunya peningkatan nasionalisme	Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
			Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
			Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat

Sumber: Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen 2021- 2026

1.4. Tindakanlanjutan Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam surat Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen nomor: 700/IP.PKD/54/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 2 Tindakanlanjutan Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
1.	Perlu perbaikan pohon kinerja sehingga penyusunan berdasarkan CSF (<i>Critical Success Factor</i>) tidak berdasarkan program/kegiatan/struktur organisasi.	Telah menyusun dan memperbaiki pohon kinerja dengan mencantumkan CSF (<i>Critical Success Factor</i>).	https://bit.ly/49JdrhY
2.	Agar mencantumkan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama (Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikal dan sumber daya ekonomi) sebagaimana tertuang dalam RENSTRA.	Telah mencantumkan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama (Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikal dan sumber daya ekonomi)	https://bit.ly/49JdrhY
3.	Agar memperbaiki Laporan Kinerja Tahun 2025 untuk mencantumkan rumus/perhitungan efisiensi pada analisis anggaran Tahun 2024.	Telah mencantumkan rumus/perhitungan efisiensi pada analisis anggaran Tahun 2024.	https://bit.ly/49JdrhY
4.	Untuk melampirkan bukti mengikuti Bimtek/Workshop SAKIP berupa sertifikat/Surat Tugas.	Telah melampirkan Sertifikat Bimtek SAKIP.	https://bit.ly/49JdrhY

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran yang akan dicapai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2021-2026 memiliki visi **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Bersama Rakyat.”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan melalui misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menjalankan misi yang ke-5 yaitu **“Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.”**

Pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan memerlukan tindak lanjut berupa penyusunan strategi

dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah Tahun 2021-2026. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi merupakan cara mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan. Kemudian strategi diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan *tools* yang dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan pembangunan menjadi panduan dalam penentuan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

VISI : “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat.”			
MISI 5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Terwujud nya kewaspadaan dini daerah	Meningkatkan partisipasi politik	Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi masyarakat.
		Pemberdayaan Ormas	Penguatan kapasitas dan kemandirian Ormas.
		Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat yang multi kultur.
			2. Menumbuhkan kesadaran wawasan kebangsaan
			3. Pembentukan jiwa patriotisme melalui program bela negara dan pendidikan wawasan kebangsaan.
			4. Penguatan ketahanan ekonomi.
			5. Penguatan fungsi FKUB dan FPBI/FPK.
			6. Penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
		Meningkatkan kewaspadaan dini di daerah	1. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
			2. Meningkatkan peran serta masyarakat (FKDM) dalam penyelenggaraan Wasdin Daerah.
			3. Penguatan Tim Penanganan Konflik Sosial.

Sumber Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen 2021-2026

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi dan melaporkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah dalam satu periode pelaporan. Indikator kinerja tersebut ditetapkan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian integral dari Rencana Strategis (Renstra). Penetapan IKU tersebut digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan dan penetapan IKU berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dirancang untuk mengukur capaian strategis dalam penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, serta stabilitas politik dan sosial kemasyarakatan. IKU tersebut juga digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri, penguatan peran organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan potensi konflik di daerah.

Dengan ditetapkannya IKU, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah dan kebijakan nasional di bidang kesatuan bangsa dan politik, guna mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman, kondusif, dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah **Terwujudnya kewaspadaan dini daerah** dengan indikator **Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi**, dengan formula pengukurannya sebagai berikut:

Gambar 2 Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikal dan sumber daya ekonomi yang ditangani}}{\text{Jumlah konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik radikal dan sumber daya ekonomi yang terjadi}} \times 100$$

Definisi operasional Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Konflik Berlatar Belakang SARA.

Konflik yang terjadi akibat perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, yang ditandai oleh munculnya ujaran, tindakan, atau sikap yang menyinggung identitas kelompok sehingga memicu ketegangan atau gangguan ketertiban sosial.

2. Konflik Berlatar Belakang Ideologi

Konflik yang muncul akibat pertentangan nilai, prinsip, atau sistem keyakinan ideologis, serta tindakan yang berupaya menolak, menentang, atau mengganti ideologi yang berlaku sehingga memengaruhi stabilitas sosial-politik.

3. Konflik Berlatar Belakang Politik.

Konflik yang timbul karena perbedaan kepentingan politik, orientasi partai, atau perebutan kekuasaan yang ditunjukkan melalui perselisihan, mobilisasi massa, atau tindakan yang mengganggu proses politik dan pemerintahan.

4. Konflik Berlatar Belakang Radikalisme.

Konflik yang disebabkan oleh penyebaran atau tindakan berbasis paham ekstrem yang menolak nilai dasar negara dan mendorong perubahan melalui cara-cara kekerasan, intoleransi, atau propaganda yang mengancam keamanan nasional.

5. Konflik Berlatar Belakang Sumber Daya Ekonomi

Konflik yang terjadi akibat perebutan, ketidakadilan akses, atau sengketa pemanfaatan sumber daya ekonomi (lahan, air, tambang, usaha, atau modal) yang menimbulkan perselisihan dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan		Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%
		Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%

Sumber Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen 2021-2026

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RJPMD tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Misi ke-5 Mewujudkan Masyarakat yang Rukun,

Berbudaya dan Bermartabat. Target indikator kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan		Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	60,71	64,29	71,43	75	78,57
2.		Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	60,71	64,29	71,43	75	78,57

Sumber Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen 2021-2026

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja yang dibuat untuk mewujudkan target kinerja. Perjanjian kinerja ini berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan:							
1.	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	%	75	-	-	-	75
	Sasaran							
1.	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	%	75	-	-	-	75

Untuk mendukung pencapaian target Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025 diselenggarakan dengan Program dan Anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7 Program dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4.125.220.250,00	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 531.853.460,00	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 4.236.436.700,00	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 49.974.400,00	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 647.921.400,00	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 1.406.701.100,00	APBD
	Jumlah	Rp 10.998.107.310,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam merealisasikan tujuan, sasaran, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Capaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang diukur secara sistematis melalui indikator kinerja, baik dari aspek input, output, maupun outcome. Capaian kinerja organisasi mencerminkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, serta menunjukkan sejauh mana organisasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Melalui pengukuran capaian kinerja organisasi, dapat dilakukan evaluasi secara objektif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, peningkatan kualitas layanan, dan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

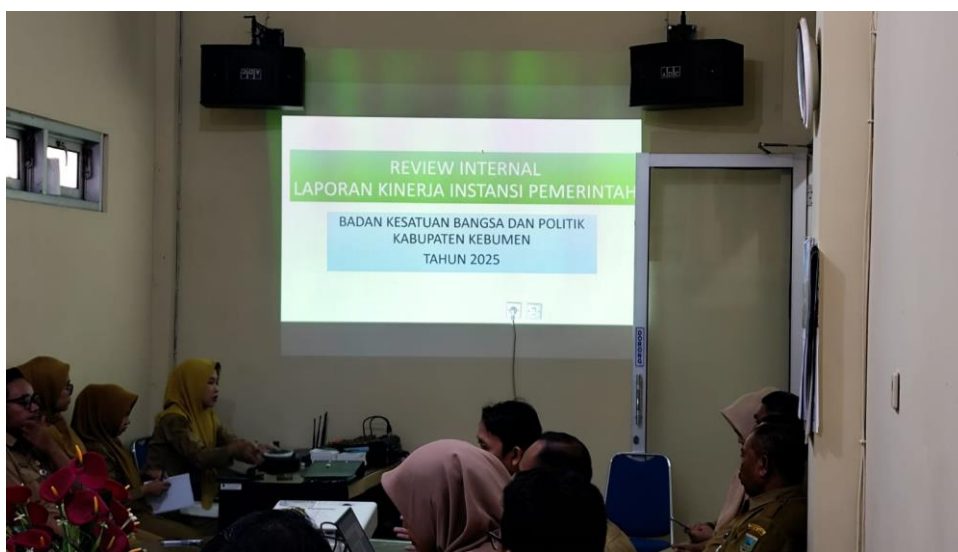
Kriteria pencapaian sasaran maupun indikator sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 8 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	$\geq 85 - 100\%$	Baik
3.	$\geq 65 - 85\%$	Cukup
4.	$\geq 50 - 65\%$	Kurang
	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Bahwa proses penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tanggal 27 Januari 2026 dan diikuti oleh seluruh karyawan/karyawati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Gambar 3 Dokumentasi Review Internal Draft LKJIP 2025



Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat di lihat pada link <https://bit.ly/45yX1Gz>

3.1.1 Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan sasaran terwujudnya kewaspadaan dini daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
	Tujuan:					
1.	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	75	100	133	Sangat Baik
	Sasaran:					
1.	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	75	100	133	Sangat Baik

Capaian kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan indikator yang ditetapkan dan dihitung berdasarkan formula penghitungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dari target 75% penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikal, dan sumber daya ekonomi telah ditangani 100%. Pada Tahun 2025 ada 37 kejadian konflik yang telah ditangani seluruhnya. Adapun rincian kejadian konflik per triwulan sebagai berikut :

Tabel 10 Jumlah Kejadian Konflik Tahun 2025

No.	Triwulan	Jumlah Kejadian Konflik	Jumlah Konflik Ditangani
1	I	9	9
2	II	8	8
3	III	9	9
4	IV	11	11
	JUMLAH	37	37

Berdasarkan tabel diatas, maka realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diukur sebaai berikut :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah konflik berlatar belakang SARA,ideologi,politik, radikal dan sumber daya ekonomi yang ditangani}}{\text{Jumlah konflik berlatar belakang SARA,ideologi,politik radikal dan sumber daya ekonomi yang terjadi}} \times 100$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{100}{75} \times 100 = 133\%$$

3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025 apabila disandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Tujuan:										
1	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	64,29	100	155	71,43	100	140	75	100	133
	Sasaran:										
1	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	64,29	100	155,55	71,43	100	140	75	100	133,33

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dari Tahun 2023 hingga 2025, dapat disimpulkan

bahwa target yang ditetapkan setiap tahun telah tercapai secara maksimal. Pada indikator utama yaitu persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikal dan sumber daya ekonomi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara konsisten mencapai target 100% sejak tahun 2023 hingga 2025.

3.1.3. Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Capaian hasil untuk indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dengan target jangka menengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
	Tujuan:					
1.	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	75 %	100 %	78,57 %	21,43 %
	Sasaran:					
1.	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	75 %	100 %	78,57 %	21,43 %

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 yaitu 21,43% untuk indikator persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikal dan sumber daya ekonomi. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan konflik untuk mewujudkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Kebumen telah berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Untuk perbandingan capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sebagai berikut:

Tabel 13 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi

No.	Tujuan/sasaran	Indikator kinerja	Realisasi 2025	Provinsi Jateng/ Kabupaten lain	Nasional	Capaian %
	Tujuan:					
1.	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	100 %	Na	Na	
	Sasaran:					
1.	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	100 %	Na	Na	

Realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 menunjukkan capaian 100% dalam indikator persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikal dan sumber daya ekonomi. Meskipun data pembandingan dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lain belum tersedia, capaian maksimal ini mencerminkan komitmen kuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan kondusifitas wilayah di Kabupaten Kebumen melalui upacara cegah dini, deteksi dini serta mediasi konflik di masyarakat.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, dilakukan analisis terhadap capaian yang telah diraih dalam periode pelaporan. Analisis ini mencakup identifikasi keberhasilan, kendala atau kegagalan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk perbaikan di masa mendatang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi capaian sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 14 Analisis Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
	Tujuan:					
1.	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	75 %	100 %		
	Sasaran:					
1.	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	75 %	100 %	Keberhasilan Indikator Kinerja Sasaran Bakesbangpol didukung hal-hal sebagai berikut : 1. Keberadaan dan peran aktif Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang menjadi mitra strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial. 2. Dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah yang melibatkan berbagai unsur intelijen guna mengumpulkan data dan informasi yang berguna untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini. 3. Dilaksanakannya komunikasi sosial antar tokoh masyarakat sehingga meningkatkan hubungan sosial di masyarakat dalam rangka mencegah potensi konflik. 4. Melaksanakan pendidikan politik masyarakat secara	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
					berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi politik masyarakat secara bertanggung jawab. 5. Adanya peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam memfasilitasi solidaritas antar umat beragama, moderasi beragama dan toleransi serta memperkuat kerukunan diantara elemen masyarakat, sehingga hal ini memiliki peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya konflik sosial 6. Pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas). Melalui pembinaan yang berkelanjutan, komunikasi, serta pengawasan yang terkoordinasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendorong ormas agar berperan aktif dalam pembangunan daerah, sekaligus menghimbau agar kegiatan ormas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

Keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam mencapai target 100% dalam mewujudkan kewaspadaan dini daerah pada tahun 2025 tidak terlepas dari terbangunnya koordinasi dan sinergi yang baik dengan instansi vertikal, perangkat daerah, aparat keamanan, serta berbagai forum kemasyarakatan yang telah terbentuk seperti FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FKUB (Forum

Kerukunan Umat Beragama) dan unsur masyarakat lainnya. Dukungan partisipasi masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah, meningkatkan toleransi, serta mencegah potensi konflik juga menjadi kekuatan penting dalam menunjang keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang spesifik, menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh wilayah dan isu strategis yang semakin kompleks. Keterbatasan dukungan anggaran juga berpengaruh terhadap optimalisasi program dan kegiatan.

Selain itu, dinamika sosial, politik, dan ideologi yang berkembang dengan cepat, termasuk pengaruh media sosial dan arus informasi global, sering kali memunculkan potensi konflik dan kerawanan baru yang sulit diprediksi.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Analisis ini dilakukan untuk menilai sejauh mana sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, maupun waktu pelaksanaan, telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol yang bersifat strategis, khususnya dalam menjaga kondusivitas daerah menuntut pengelolaan sumber daya yang efisien namun tetap efektif. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan diarahkan agar mampu menghasilkan output dan outcome yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang terukur, tepat sasaran, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15 Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	100%	18.177.800,00	17.325.400,00	95,31%	0,05
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	3.777.767.200,00	3.264.050.400,00	86,40%	0,14
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	58.517.700,00	57.174.635,00	97,70%	0,02
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 unit	7 unit	100%	14.965.250,00	12.923.158,00	86,35%	0,14
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	119.093.300,00	104.637.201,00	87,86%	0,12
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	35 unit	35 unit	100%	136.699.000,00	136.081.139,00	99,55%	0,00

No.	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Tingkat Efisiensi
7	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	23 kegiatan	23 kegiatan	100%	531.853.460,00	523.303.140,00	98,39%	0,02
8	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4.236.436.700	4.149.110.209,00	97,94	0,02
9	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	49.974.400,00	48.781.763,00	97,61	0,02

No.	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Tingkat Efisiensi
10	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5 lokasi	5 lokasi	100%	647.921.400,00	637.534.956,00	98,40	0,02
11	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 dokumen	dokumen	100%	140.6701.100,00	1.361.137.488,00	96,76	0,03

Berdasarkan hasil analisis efisiensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung terwujudnya kewaspadaan dini daerah telah dilakukan secara efisien. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.998.107.310,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.312.059.310,00 atau 93,76%, dan masuk kategori efisien, dimana terdapat penghematan anggaran sebesar 6,24% dari total alokasi tanpa mengurangi pencapaian target kinerja, dimana capaian kinerjanya sebesar 133%.

Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah diimplementasikan dengan baik, menghasilkan output sesuai target, serta menggunakan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan. Efisiensi ini mencerminkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tepat dalam mendukung terwujudnya kondusivitas wilayah di Kabupaten Kebumen. Adapun formulasi penghitungan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Gambar 4 Formulasi Penghitungan Tingkat Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E: Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Tabel 16 Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasi

No.	JenisTenaga	Kebutuhan	Realisasi	Keterangan
1.	Struktural	7	7	-
2.	Fungsional	28	14	Kurang 14
3.	JFU	39	9	Kurang 30
	Jumlah	74	30	Kurang 44

Berdasarkan kondisi sumber daya aparatur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini didukung oleh 30 orang pegawai, sementara

kebutuhan ideal pegawai mencapai 74 orang. Dengan demikian, tingkat pemenuhan kebutuhan pegawai baru mencapai sekitar 40,5%, sehingga terdapat kekurangan pegawai sebesar 44 orang.

Meskipun menghadapi keterbatasan jumlah pegawai tersebut, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercatat sebesar 133%, yang menunjukkan bahwa organisasi mampu melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya aparatur, serta optimalisasi peran pegawai yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Ditengah keterbatasan jumlah pegawai, guna mencapai target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan penguatan koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal maupun unsur masyarakat serta memanfaatkan mekanisme kerja kolaboratif seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama serta jejaring *stakeholder* lainnya. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja tetap diperlukan guna menjaga konsistensi kualitas layanan, meningkatkan ketahanan organisasi, serta mendukung pencapaian kinerja secara berkelanjutan.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Kwsatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen berhasil mencapai target kinerja dengan tingkat realisasi 133% pada indikator Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi. Hal ini mencerminkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai perencanaan.

Sebagai penyelenggaran urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 menyelenggarakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Capaian atas keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang berkaitan dengan pencapaian sasaran dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 17 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Tujuan :						
1	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi					
	Sasaran:						
1	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	100				
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
2				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	533,51	Menunjang
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	Menunjang
3				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rasio elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	641	Menunjang
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	100	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
4				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Capaian Partisipasi Masyarakat/ Penduduk Dalam Proses Pemilihan Umum	100	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	Menunjang
5				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	Menunjang
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pengurus orkesmas baru di Kabupaten Kebumen yang mengikuti pembinaan	100	Menunjang
6				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi.	100	Menunjang
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	100	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Penanganan Konflik Sosial		

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan turut mendukung terwujudnya kewaspadaan dini daerah melalui pelaksanaan kegiatan Paskibraka serta peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan Paskibraka tidak hanya berfungsi sebagai pembinaan generasi muda dalam aspek kedisiplinan, kepemimpinan, dan nasionalisme, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila, semangat kebangsaan, serta cinta tanah air.

Sementara itu, kegiatan peringatan HUT RI menjadi momentum strategis dalam memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong masyarakat lintas elemen. Melalui rangkaian kegiatan upacara, sosial, dan partisipatif, nilai-nilai kebangsaan terus dipupuk sehingga dapat meminimalisasi potensi konflik sosial, intoleransi, dan disintegrasi. Sinergi antara pembinaan Paskibraka dan peringatan HUT RI tersebut secara nyata berkontribusi dalam menciptakan kondisi sosial yang kondusif, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap stabilitas daerah, serta memperkuat sistem kewaspadaan dini dalam menghadapi potensi ancaman terhadap ideologi, politik, sosial, dan keamanan di daerah.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik memiliki keterkaitan erat dalam mewujudkan kewaspadaan dini daerah, khususnya melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik, nilai-nilai demokrasi, serta etika budaya politik yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sehingga mampu

membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui pendidikan politik kepada masyarakat, potensi kerawanan politik seperti politik identitas, penyebaran hoaks, provokasi, dan konflik kepentingan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini. Masyarakat yang memiliki literasi politik yang baik akan lebih mampu menyikapi dinamika politik secara rasional dan damai, serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya kewaspadaan dini daerah melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendayagunaan potensi ormas serta pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas ormas. Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah daerah mendorong ormas untuk berperan aktif sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi konflik di lingkungan masyarakat.

Selain itu, kegiatan pengawasan ormas dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ormas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila, serta tidak bertentangan dengan ideologi negara dan keutuhan NKRI. Pengawasan ini menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi secara dini potensi penyimpangan, gesekan antarormas, maupun penyebaran paham radikal dan intoleran.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya memiliki keterkaitan yang kuat dalam mendukung terwujudnya kewaspadaan dini daerah melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta sosialisasi wawasan kebangsaan. Program ini diarahkan untuk memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika dan potensi kerawanan

yang dapat memicu konflik sosial, ketegangan antar kelompok, maupun gangguan stabilitas daerah.

Melalui sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, masyarakat didorong untuk memiliki kesadaran dan kemampuan adaptif dalam menghadapi tekanan ekonomi, perubahan sosial, serta pergeseran nilai budaya yang berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial. Fasilitasi kegiatan FKUB berperan strategis dalam menjaga dan memperkuat kerukunan antarumat beragama, mendorong dialog, serta menyelesaikan potensi konflik berbasis keagamaan secara dini dan damai. Sementara itu, kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan menjadi sarana penguatan nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan toleransi sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional serta Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial merupakan program inti yang secara langsung mendukung terwujudnya kewaspadaan dini daerah. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain rapat-rapat kewaspadaan dini dan penanganan konflik, rapat-rapat jejaring kewaspadaan di wilayah, rapat-rapat penjangkaran isu-isu strategis dan terkini, fasilitasi kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sosialisasi kewaspadaan dini dan penanganan konflik, serta rapat-rapat koordinasi dengan masyarakat dalam penanganan konflik sosial.

Melalui rapat kewaspadaan dini dan penjangkaran isu-isu terkini, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi secara cepat potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Rapat jejaring di wilayah memperkuat sistem informasi kewaspadaan berbasis wilayah dengan melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan elemen strategis lainnya, sehingga potensi konflik dapat dideteksi dan ditangani sejak tahap awal.

Fasilitasi kegiatan Forkopimda serta rapat koordinasi dengan masyarakat menjadi wadah penting dalam membangun sinergi,

menyamakan persepsi, dan merumuskan langkah-langkah penanganan konflik secara terpadu dan berkelanjutan. Sementara itu, kegiatan sosialisasi kewaspadaan dini dan penanganan konflik berfungsi meningkatkan pemahaman serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah dan menyelesaikan konflik secara damai.

3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan digunakan untuk mengetahui seberapa besar alokasi dan penyerapan anggaran yang dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Penyerapan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran Rp. 10.998.107.310,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp10.312.059.489,00 atau 93,76% dari pagu anggaran. Anggaran dan realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 tertera pada Tabel 18.

Tabel 18 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.125.220.250,00	3.592.191.933,00	87,08
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.177.800,00	17.325.400,00	95,31
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.777.767.200,00	3.264.050.400,00	86,4
c	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.517.700,00	57.174.635,00	97,7
d	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.965.250,00	12.923.158	86,35
e	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.093.300,00	10.4637.201,00	87,86

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
f	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.699.000,00	136.081.139,00	99,55
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	531.853.460,00	523.303.140,00	98,39
a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	531.853.460,00	523.303.140,00	98,39
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.236.436.700,00	4.149.110.209,00	97,94
a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.236.436.700,00	4.149.110.209,00	97,94
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	49.974.400,00	48.781.763,00	97,61
a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	49.974.400,00	48.781.763,00	97,61
5	Program Pembinaan dan	647.921.400	637.534.956,00	98,4

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
	Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	647.921.400	637.534.956,00	98,4
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.406.701.100	1.361.137.488	96,76
a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.406.701.100	1.361.137.488	96,76
	JUMLAH	10.998.107.310,00	10.312.059.489 ,00	93,76

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efisien dan seefektif mungkin.

Tujuan penyusunan laporan LKJIP adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi

organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan LKJIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025 menguraikan keberhasilan dan hambatan pelaksanaan misi organisasi. Dari uraian pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu :

“Terwujudnya kewaspadaan dini daerah dengan indikator persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikal dan sumber daya ekonomi” terealisasi 100% dari target 75% atau persentase capainnya sebesar 133%.

2. Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dari pagu Rp 10.998.107.310,00 terealisasi 10.312.059.489,00. atau 93,76%.

4.2 Permasalahan/Kendala

Dalam upaya mencapai kinerja organisasi yang optimal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) masih menghadapi sejumlah permasalahan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal, diantaranya :

1. Keterbatasan sumber daya aparatur
Jumlah dan kompetensi pegawai belum sepenuhnya sebanding dengan luasnya tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga berdampak pada beban kerja yang tinggi.
2. Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa.

Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat

Kesadaran dan keterlibatan sebagian masyarakat dalam upaya menjaga stabilitas, kerukunan, dan kewaspadaan dini daerah masih perlu ditingkatkan.

4. Koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya optimal

Perbedaan prioritas program antar perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya berpotensi menghambat sinergi pelaksanaan kegiatan.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Untuk meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimasa yang akan datang perlu menerapkan strategi peningkatan kinerja yang terencana, adaptif, dan berkelanjutan, diantaranya :

1. Penguatan kapasitas sumber daya aparatur.

Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, optimalisasi pembagian tugas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

2. Penguatan internalisasi nilai Pancasila dan budaya bangsa melalui sosialisasi, pendidikan karakter, dan kegiatan kebangsaan yang berkelanjutan di masyarakat

3. Penguatan sistem kewaspadaan dini daerah.

Meningkatkan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan analisis data informasi lapangan melalui FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), Puskomin (Pusat Komunikasi), dan jejaring intelijen kewilayahan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

4. Peningkatan sinergi dan jejaring kerja sama.

Mengoptimalkan peran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FKDM, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan instansi vertikal terkait.

5. Peningkatan partisipasi dan edukasi masyarakat.

Melaksanakan pendidikan politik, penguatan wawasan kebangsaan, serta pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan secara berkelanjutan untuk membangun kesadaran kolektif menjaga stabilitas daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang dapat kami susun dan laporkan, semoga dapat memacu kinerja organisasi untuk lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kebumen, 27 Januari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kebumen



Widiatmoko, S.H., M.H.
Pemuda Utama Muda
NIP. 196811281996031006

LAMPIRAN